



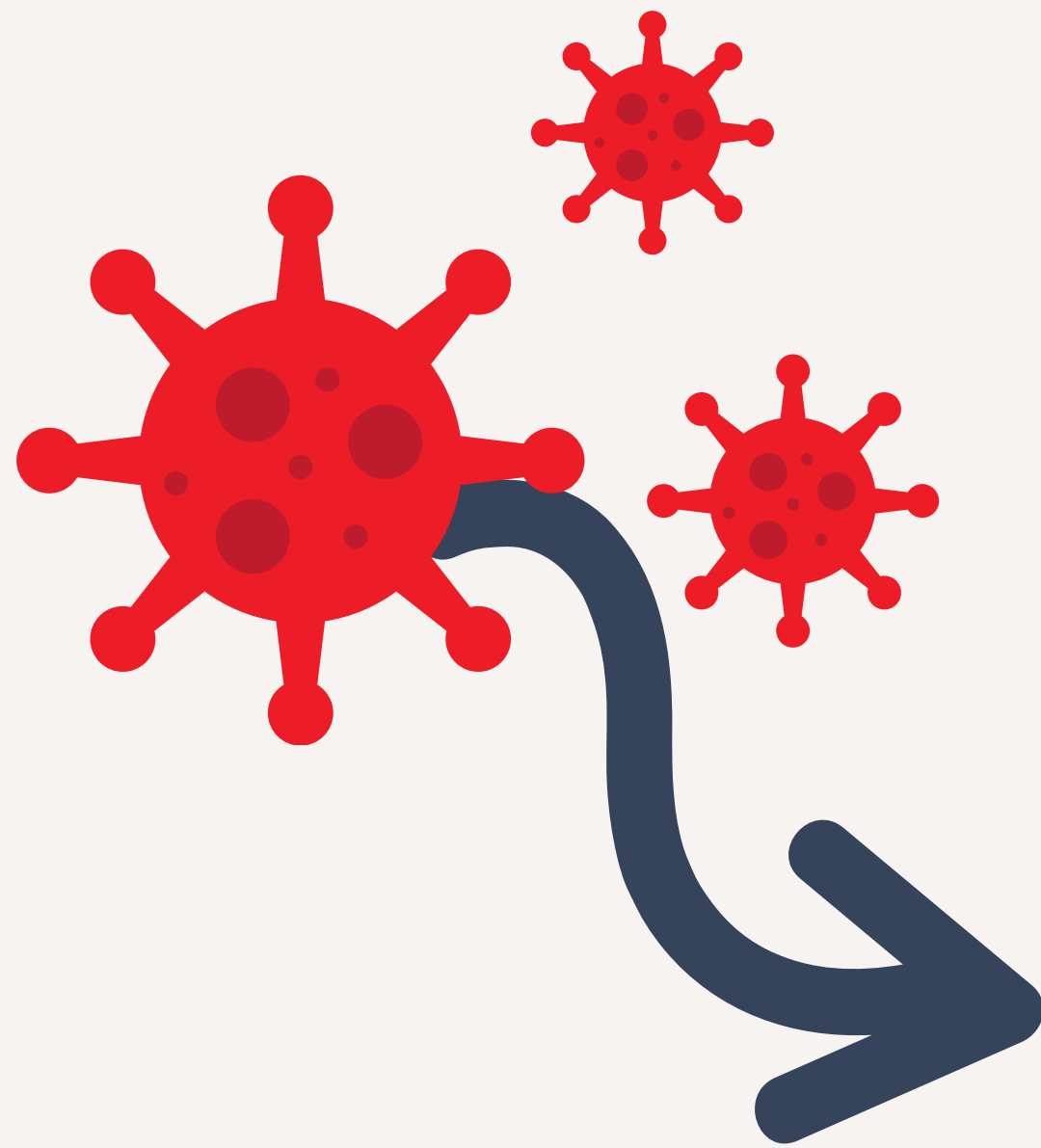
# BUDGET TAGGING DAN PERBAIKAN TATA KELOLA SEKTORAL

Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim Dan Multilateral  
Badan Kebijakan Fiskal, Kemenkeu  
Maluku, 2021



---

Juni 2021 |



## Dana publik yang ada tidak cukup !

“Jumlah investasi dan aliran dana yang diperlukan untuk mencapai target pengurangan emisi (mitigasi) dan peningkatan kemampuan adaptasi jauh lebih besar dibandingkan dana yang tersedia dari dana publik dari dalam negeri maupun dari mekanisme pendanaan multilateral dan bilateral”

(Laporan UNFCCC 26 November 2008)



**Perlu peran serta dan investasi dari Swasta dan Pasar**

# Alokasi Perencanaan dan Penganggaran Seringkali **Belum Sinkron**

Perencanaan program dan penganggaran tdk terkoneksi



pendanaan menjadi tdk optimal;

Bahasa renaksi (RAN/D)



tdk serta merta terkoneksi dengan bahasa penganggaran;

PUPK belum diterjemahkan dengan baik



tumpang tindih kewenangan;

Perencanaan program dan penganggaran tidak tersusun dengan bahasa kinerja yang pas  
↓  
input-proses-kegiatan-output-outcome dan juga satuan kegiatan dan unit cost;

## Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi 2010-2014 (triliun rupiah)

	2010	2011	2012	2013	2014
Pelayanan umum	67.7	64.6	64.1	62.1	66.9
Pertahanan	2.4	5.8	6.1	7.7	6.5
Ketertiban dan keamanan	2.0	2.5	2.9	3.2	2.8
Ekonomi	7.5	9.9	10.5	9.5	8.9
Lingkungan hidup	0.9	1.0	0.9	0.9	0.8
Perumahan & fasilitas umum	2.9	2.6	2.6	3.0	2.1
Kesehatan	2.7	1.6	1.5	1.5	0.9
Pariwisata & ekonomi kreatif	0.2	0.4	0.2	0.2	0.1
Agama	0.1	0.2	0.3	0.3	0.3
Pendidikan	13.0	11.1	10.4	10.1	10.1
Perlindungan sosial	0.5	0.4	0.5	1.5	0.5
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

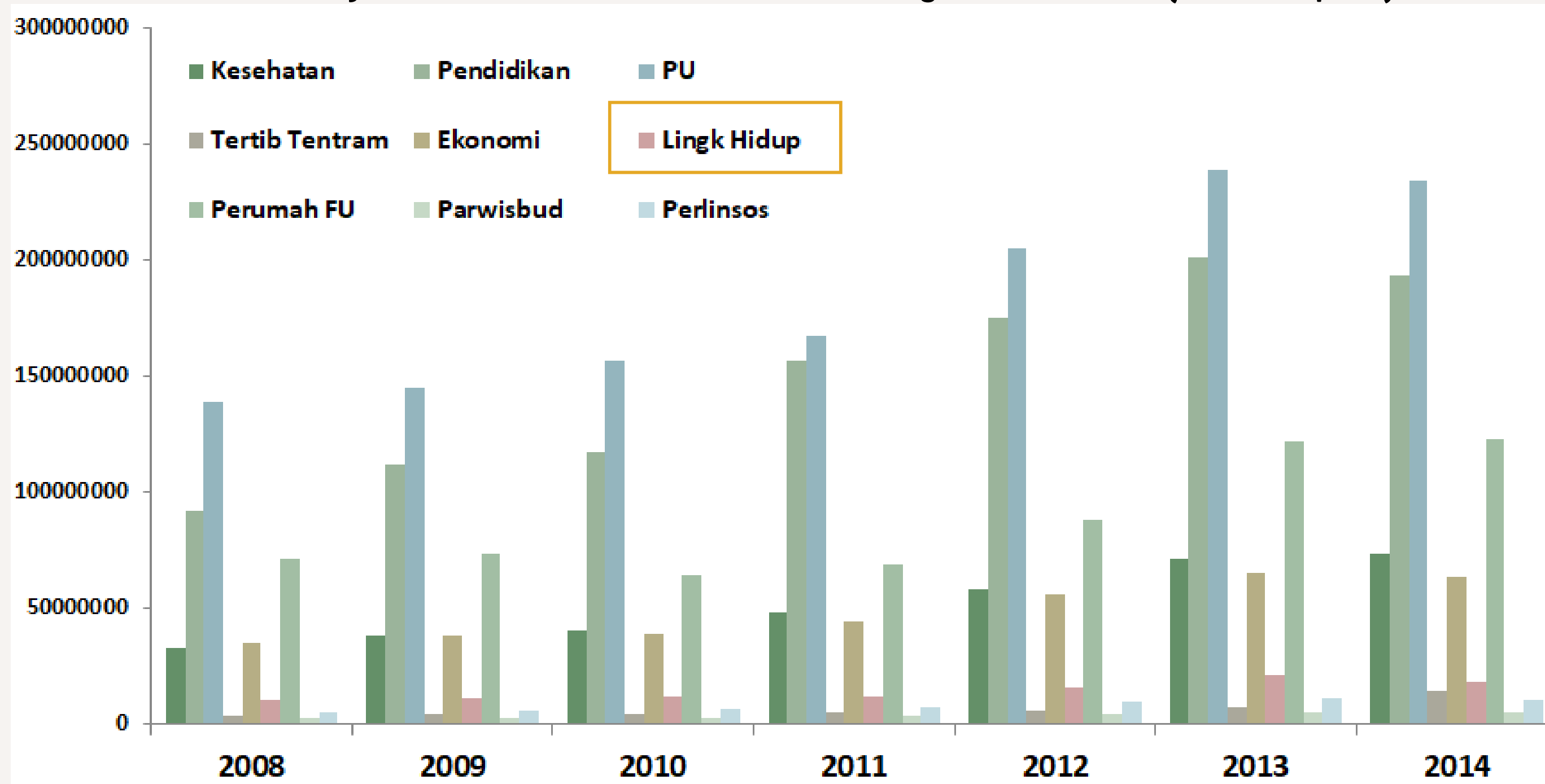
- Alokasi belanja fungsi lingkungan hidup relatif stagnan dan cenderung kecil dibandingkan alokasi belanja fungsi lainnya;

- Belanja fungsi lingkungan hidup hanya menjadi TUSI-nya KLHK:

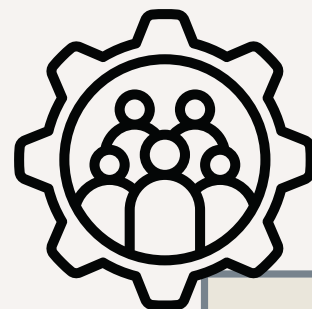


# Konfigurasi Pendanaan Publik APBD

Belanja Pemerintah Daerah Menurut Fungsi 2010-2014 (triliun rupiah)

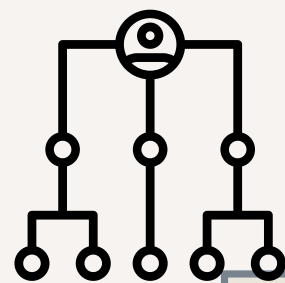


- Alokasi belanja fungsi lingkungan di APBD relatif sama dan searah dengan pola di APBN;
- Belanja fungsi lingkungan hidup hanya menjadi TUSI-nya DLH;



## Perbaiki Tata Kelola

Skema Budget Tagging & Budget Scoring



## Perubahan Mekanisme Pengelolaan Sektoral

Sektor jangan hanya dikelola secara sektoral



## Skema insentif dan dis-insentif

Berbasis performa kinerja

# TANTANGAN PENGELOLAAN FISKAL

Mendorong pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan serta mencerdaskan kehidupan bangsa

## PENERIMAAN NEGARA

- Reformasi Perpajakan,
- Reformasi Bea dan Cukai,
- PNBP optimal

## BELANJA PUSAT

- Efisiensi dan Simplifikasi
- Perangi Korupsi
- Sesuai Prioritas
- Perencanaan dan Sinergi
- Subsidi Tepat Sasaran

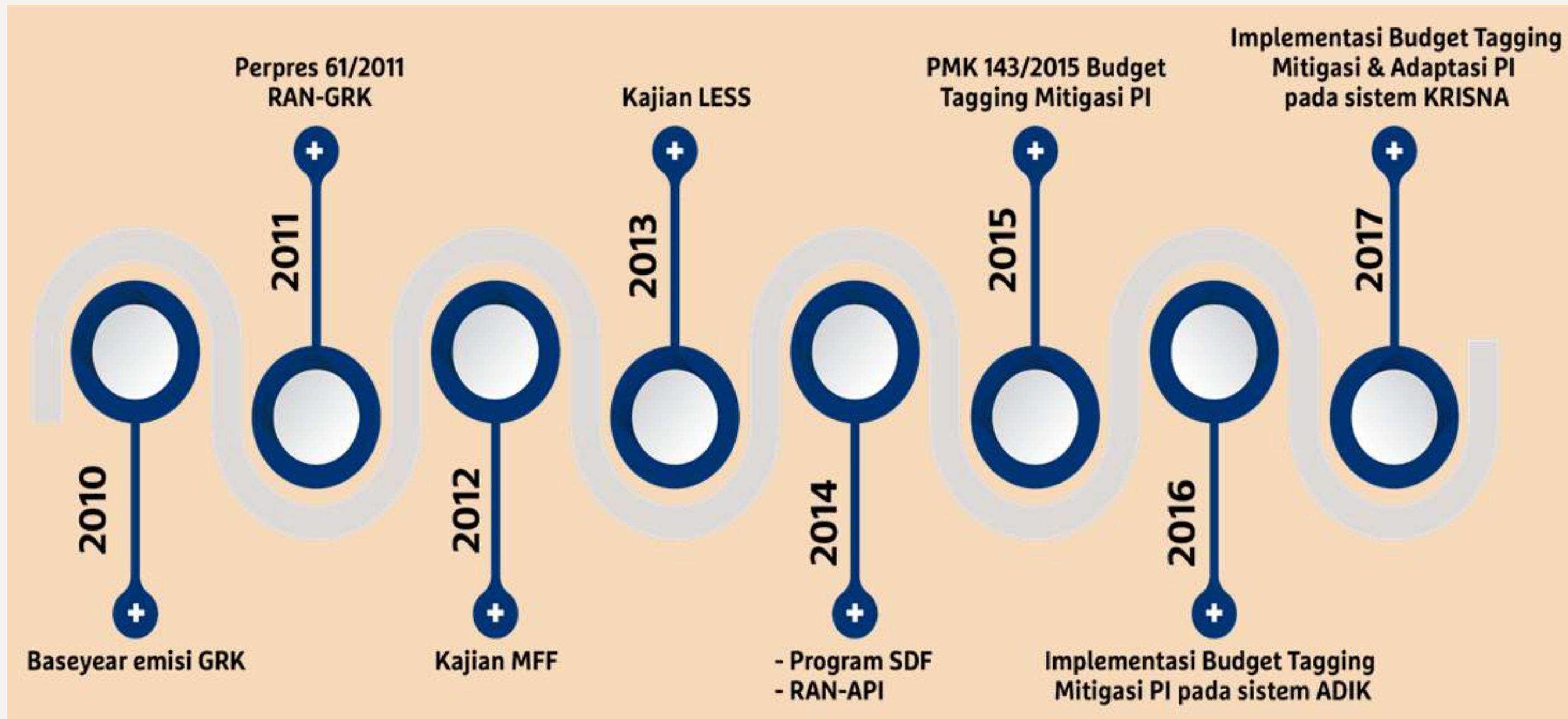
## BELANJA DAERAH

- DAU-Equaliser
- DAK Pengurangan kemiskinan dan kesra
- Dana Desa: Efektif
- Dana Otsus : Akuntabel dan Efisien

## PEMBIAYAAN

- Hati hati dan bijaksana
- Arah untuk produktifitas Pembiayaan Inovatif dan
- Kreatif (LPDP/SWF, LMAN, PPP)

# Kasus di Pusat: Climate Budget Tagging (SDG's Goal#13)



**Untuk mendukung kebijakan perubahan iklim, Kementerian Keuangan telah melakukan beberapa hal sbb:**

- Penyusunan Mitigation Fiscal Framework/MFF (2012)
- Penyusunan kajian Low Emission Budget Tagging & Scoring System/LESS (2013)
- Sebagai tindaklanjut hasil rekomendasi dari studi MFF dan LESS, dilakukan program Sustainable Development Finance/SDF (2014)



# LOW EMISSION BUDGET TAGGING and SCORING SYSTEM (LESS)

for Climate Change Mitigation Expenditures  
in Indonesia

SUMMARY  
2014



Engagement First,  
Resilience matters.

## PAPARAN HASIL KAJIAN ANALISA BELANJA PUBLIK MITIGASI PERUBAHAN IKLIM/ CLIMATE PUBLIC EXPENDITURE REVIEW (CPER)

Di Provinsi Jambi  
Tahun 2010 – 2013

Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral,  
Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan RI  
Jambi, 16 Juni 2016



Engagement First,  
Resilience matters.

## KAJIAN BELANJA MITIGASI PERUBAHAN IKLIM DAN PENANDAAN ANGGARAN (BUDGET TAGGING)

Studi Kasus : Provinsi. DI Yogyakarta  
TAHUN 2010 – 2014

28 Januari 2015

## Climate Budget Tagging (SDG's Goal#13)



- Mengembangkan sistem yang memungkinkan untuk menelusuri, memonitoring dan melaporkan pengeluaran-pengeluaran mitigasi/adaptasi perubahan iklim;
- Sistem ini akan menandai anggaran yang relevan dengan kegiatan mitigasi/adaptasi perubahan iklim untuk kemudian diidentifikasi dan melaporkan proporsi pengeluaran pemerintah daerah yang dialokasikan dan direalisasikan dalam implementasi tindakan mitigasi/adaptasi;

# Penandaan Anggaran Mitigasi PI di Nasional



Penandaan anggaran adalah sistem yang telah dikembangkan berdasarkan sistem penganggaran berbasis kinerja (PBK) dan telah dimasukkan ke dalam sistem penganggaran nasional.

Penandaan anggaran telah diimplementasikan pada APBN TA 2016 dan 2017 dengan 6 kementerian yang diamanatkan oleh RAN-GRK.



PMK No.136/2014; No.143/2015; No.163/2016



**ADIK SYSTEM**  
Arsitektur dan Informasi Kerja

- Transparent
- User Friendly
- Tracking
- Accountable

## Mandatory Key Line Ministries in Carbon Emissions Reduction



MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTRY



MINISTRY OF AGRICULTURE



MINISTRY OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES



MINISTRY OF TRANSPORTATION

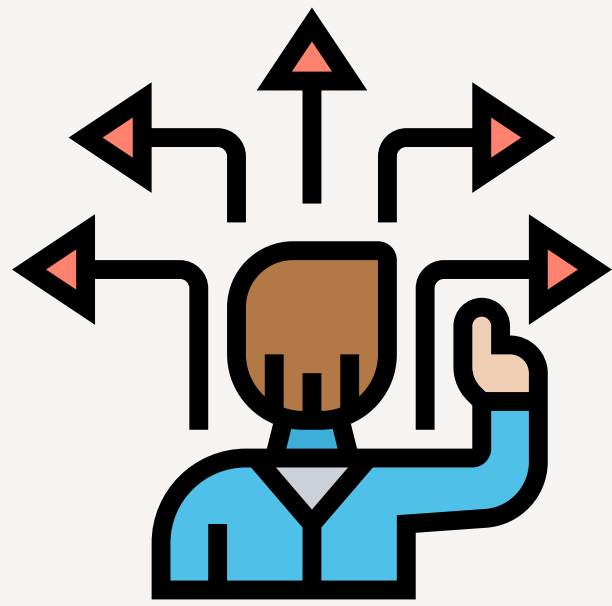


MINISTRY OF PUBLIC WORK AND SETTLEMENT



MINISTRY OF INDUSTRY





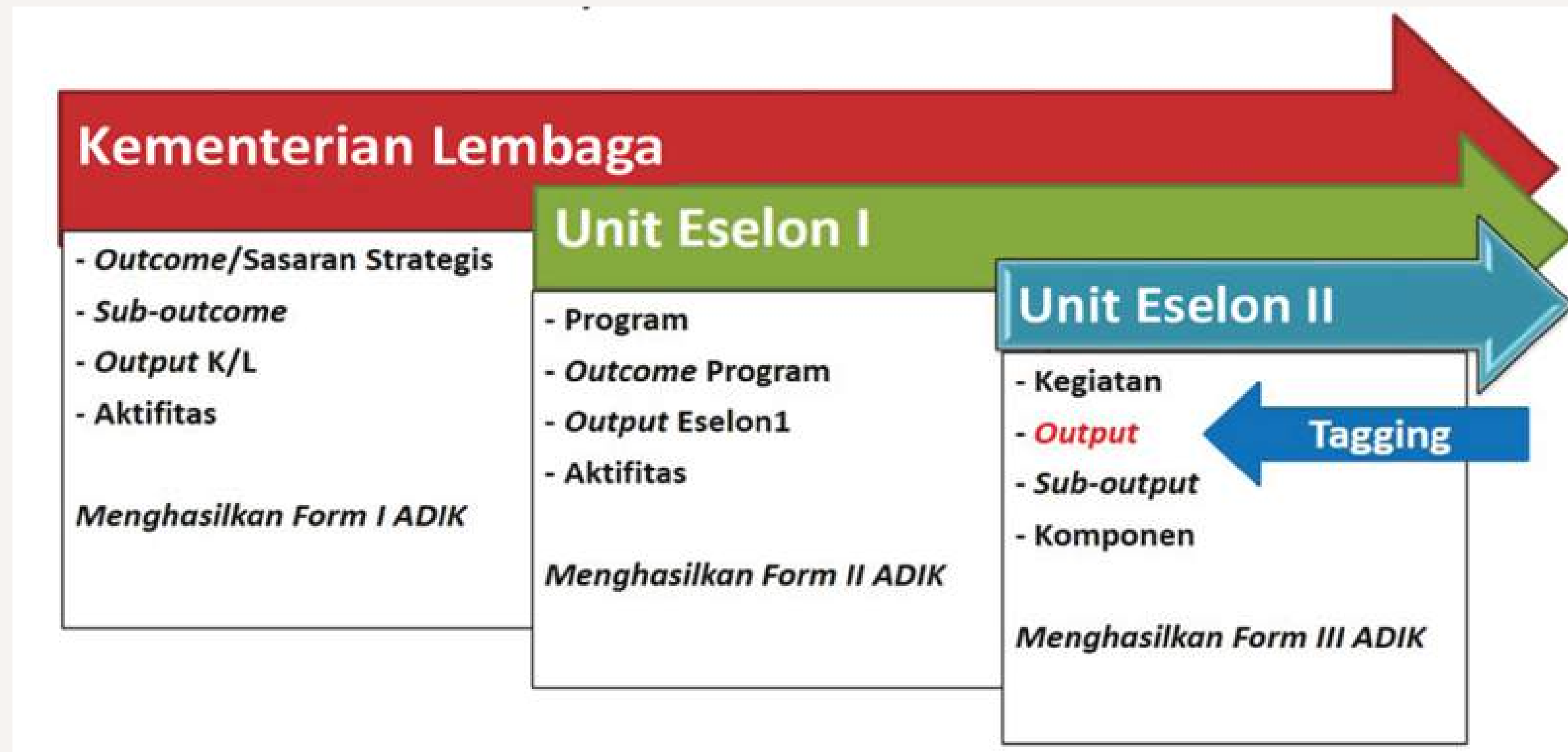
## Manfaat Penandaan Anggaran Mitigasi PI Nasional

- Memperbaiki pelaporan dan penelusuran anggaran terkait perubahan iklim dalam APBN
- Memperkuat kemampuan pembuat kebijakan untuk mengelola dan mengalokasikan sumber keuangan domestik secara lebih efektif dan efisien
- Memudahkan pengambil keputusan untuk mengarahkan dan memprioritaskan kebijakan agar dapat memenuhi target mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
- Menentukan mekanisme yang tepat untuk mengalokasikan sumber daya keuangan guna mencapai komitmen nasional



## Output sebagai basis Penandaan

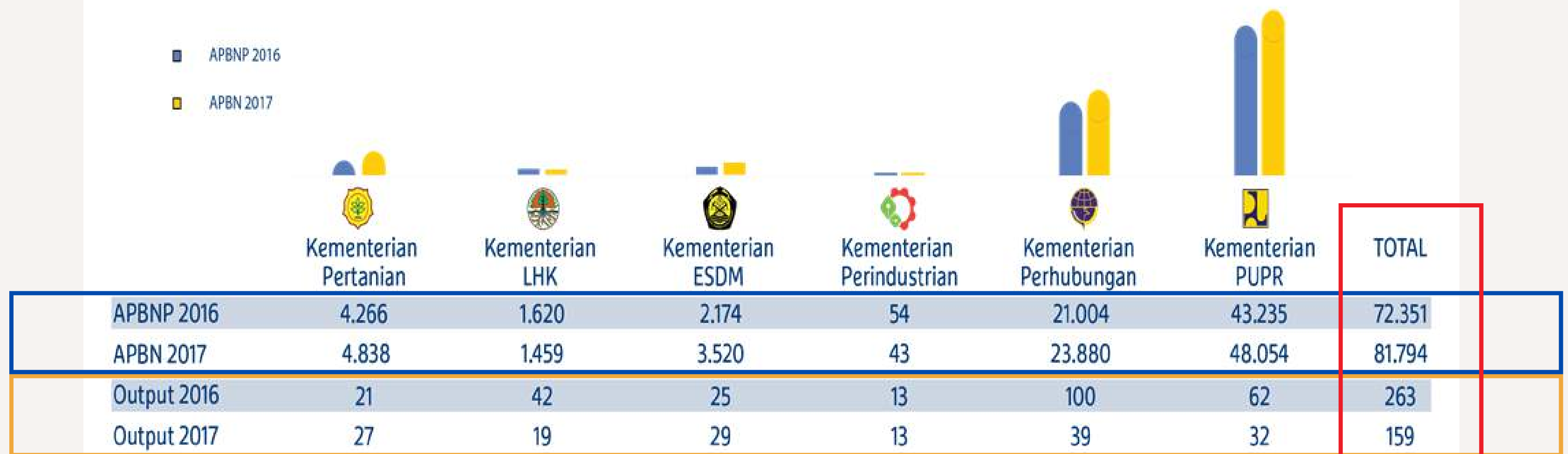
Penandaan anggaran mitigasi perubahan iklim dilakukan pada level *output* karena tingkatan ini mempunyai informasi yang tepat untuk mengetahui indikator capaian dan besaran anggaran yang dialokasikan. Hal ini akan memudahkan untuk mengidentifikasi dan menelaah kesesuaiannya dengan definisi dan cakupan kegiatan mitigasi perubahan iklim.



## Hasil Budget Tagging Mitigasi PI di APBN-P 2016 dan APBN 2017

### ALOKASI ANGGARAN (MILIAR RUPIAH)

■ APBNP 2016  
■ APBN 2017



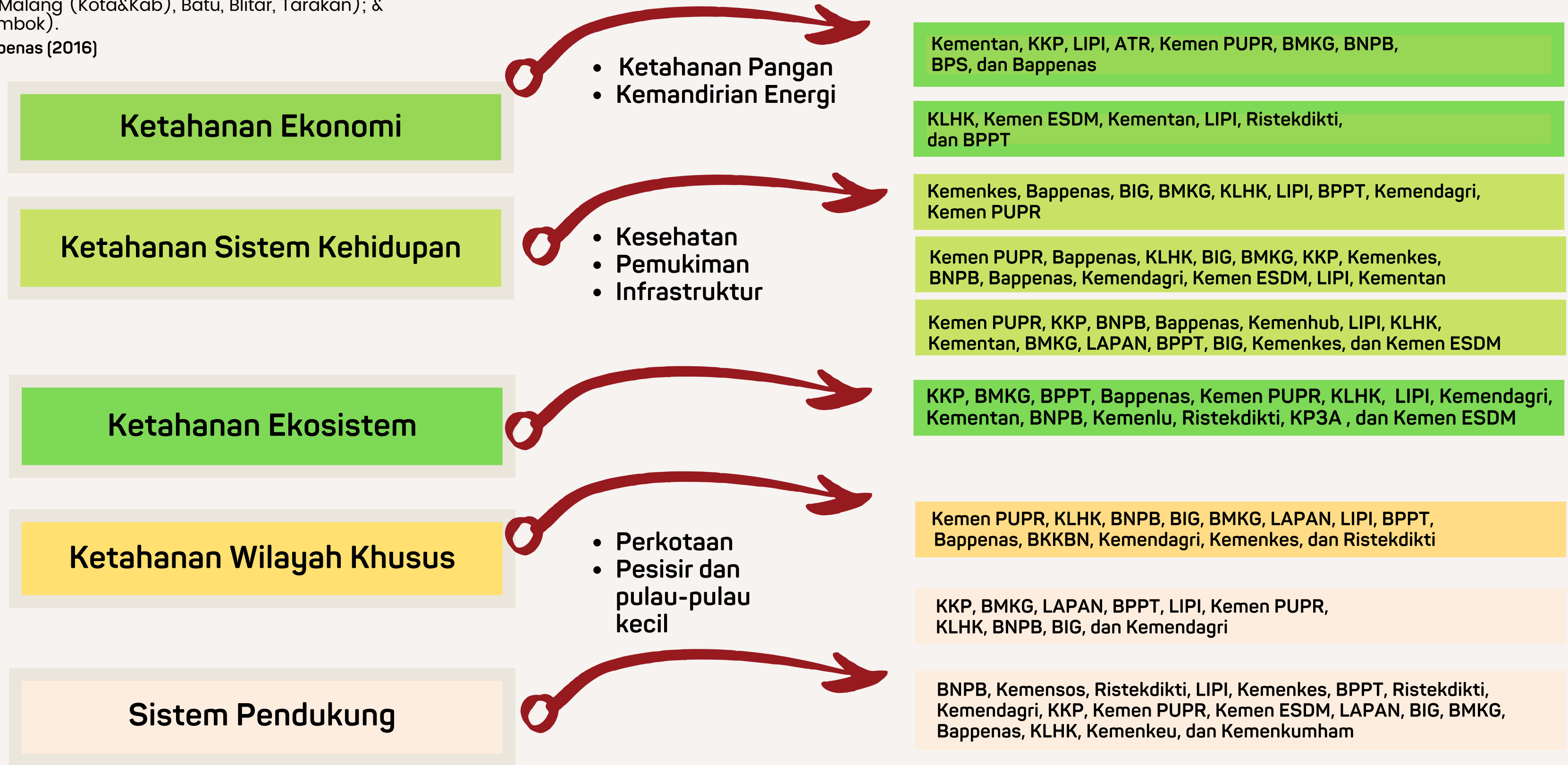
- Output hasil tagging 2017 lebih sederhana, sebagai dampak dari implementasi PBK
- Dari sisi anggaran, alokasi 2017 meningkat dibandingkan alokasi 2016 di 6 K/L terkait mitigasi
- Alokasi anggaran KemenPUPR dan Kemenhub paling besar dan meningkat, untuk mendukung percepatan infrastruktur.
- Target penurunan emis i KLHK dan KESDM dalam RAN-GRK terbilang besar, namun alokasi anggaran relatif kecil dibandingkan K/L lainnya

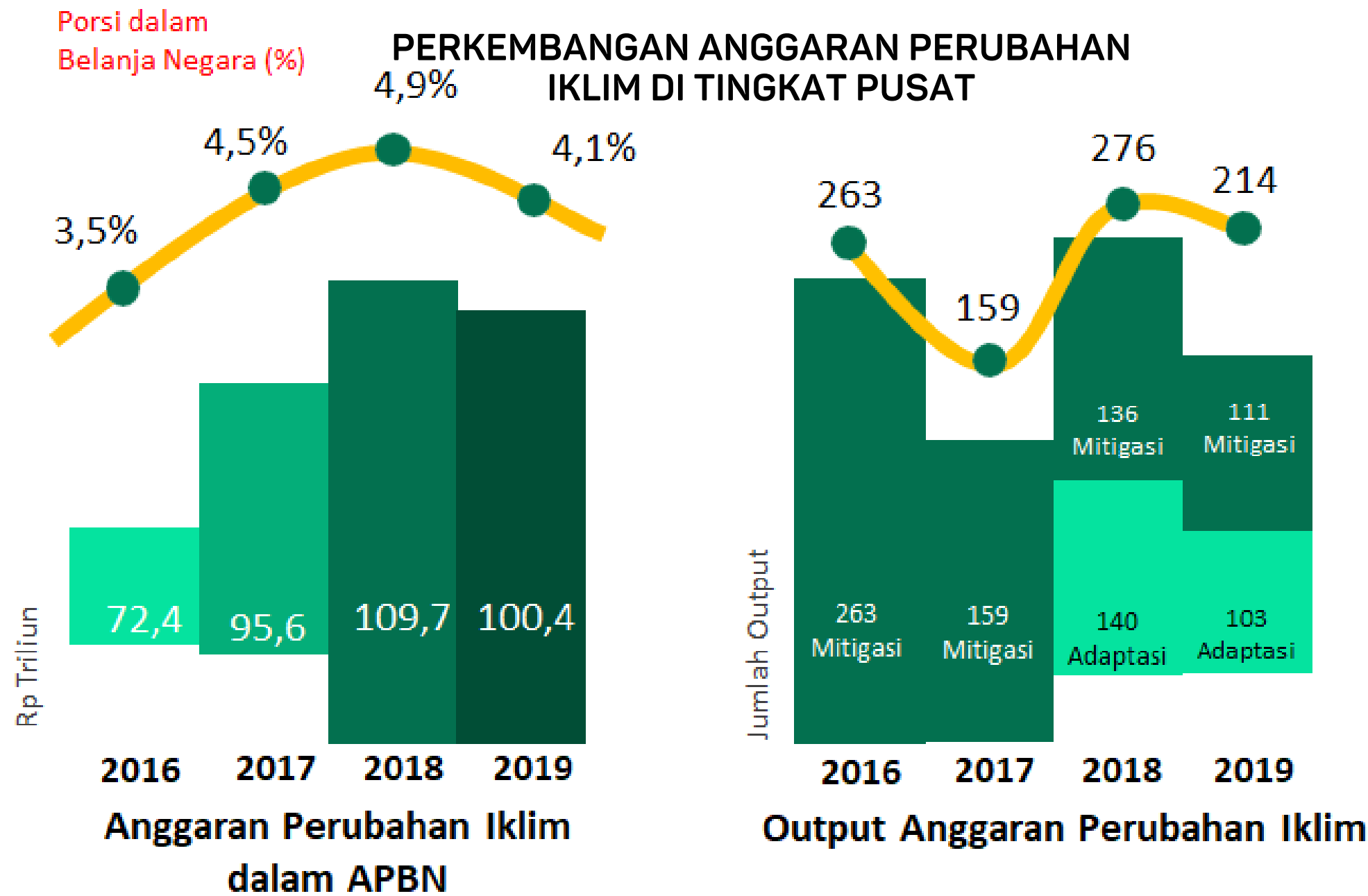
# Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API)



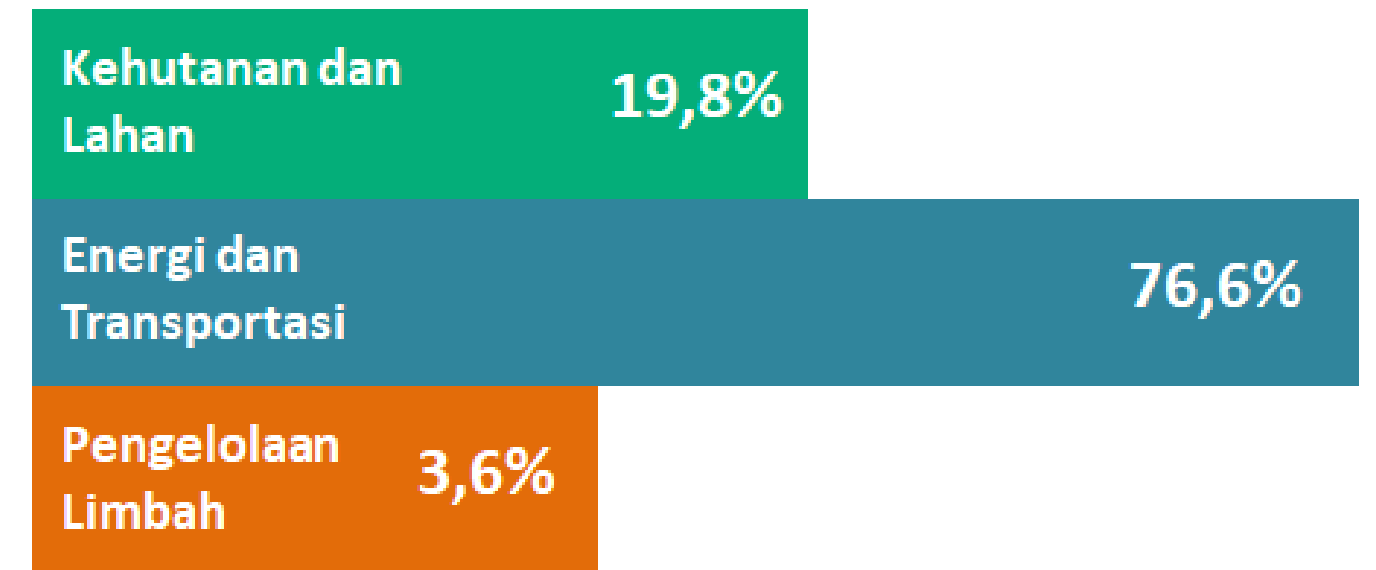
Lokasi percontohan pelaksanaan RAN-API: 15 piloting 6 Provinsi (Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, NTB); 8 Kota/Kab (Bandar Lampung, Pekalongan, Semarang, Malang (Kota&Kab), Batu, Blitar, Tarakan); & 1 Pulau (Lombok).

Sumber: Bappenas (2016)

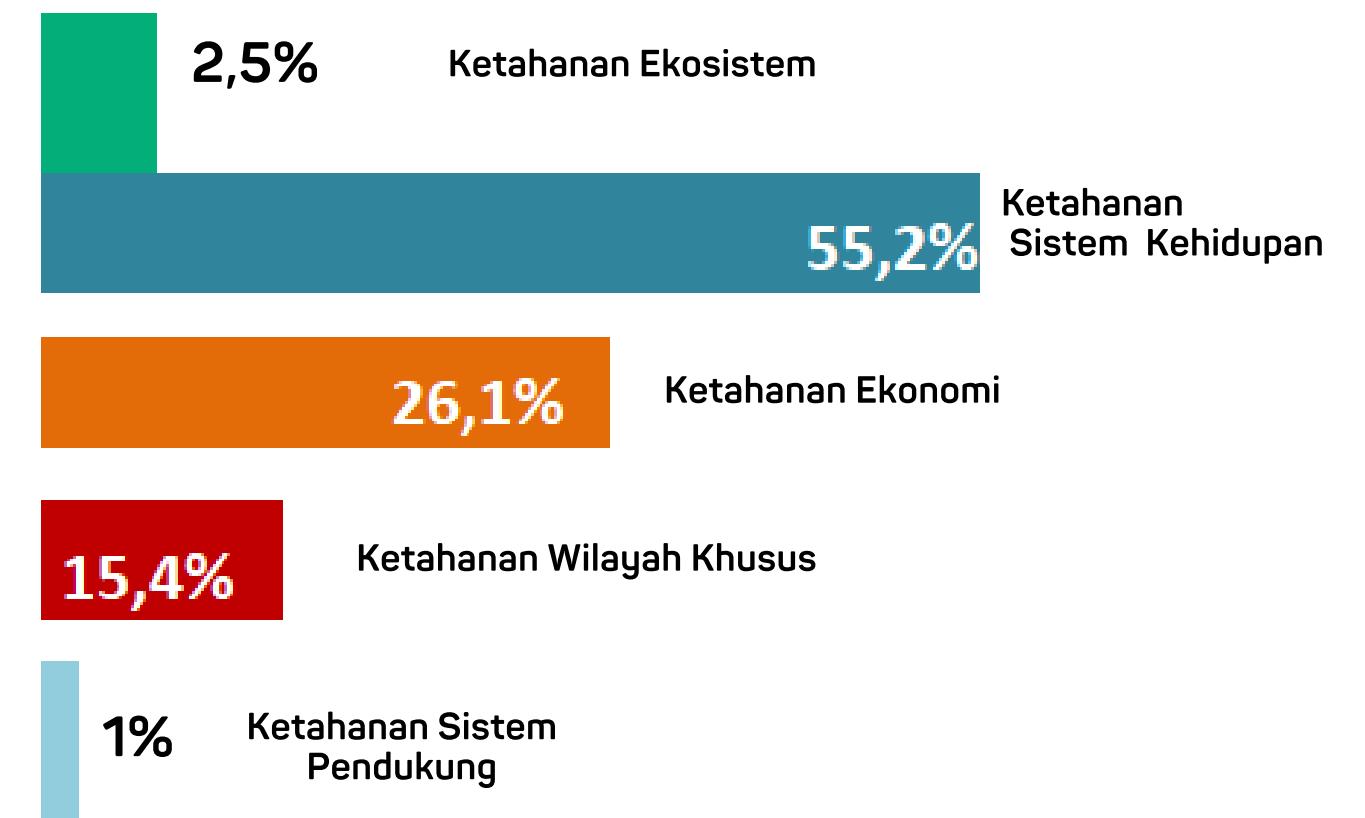




### Output Mitigasi per Sektor

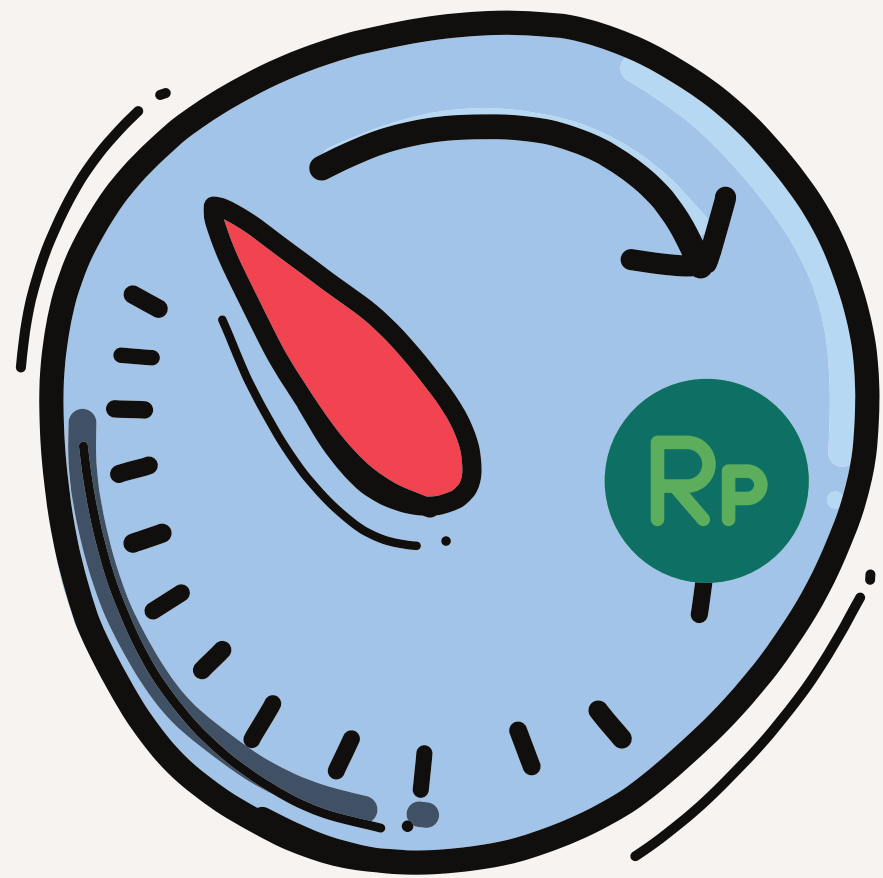


### Output Adaptasi per Sektor

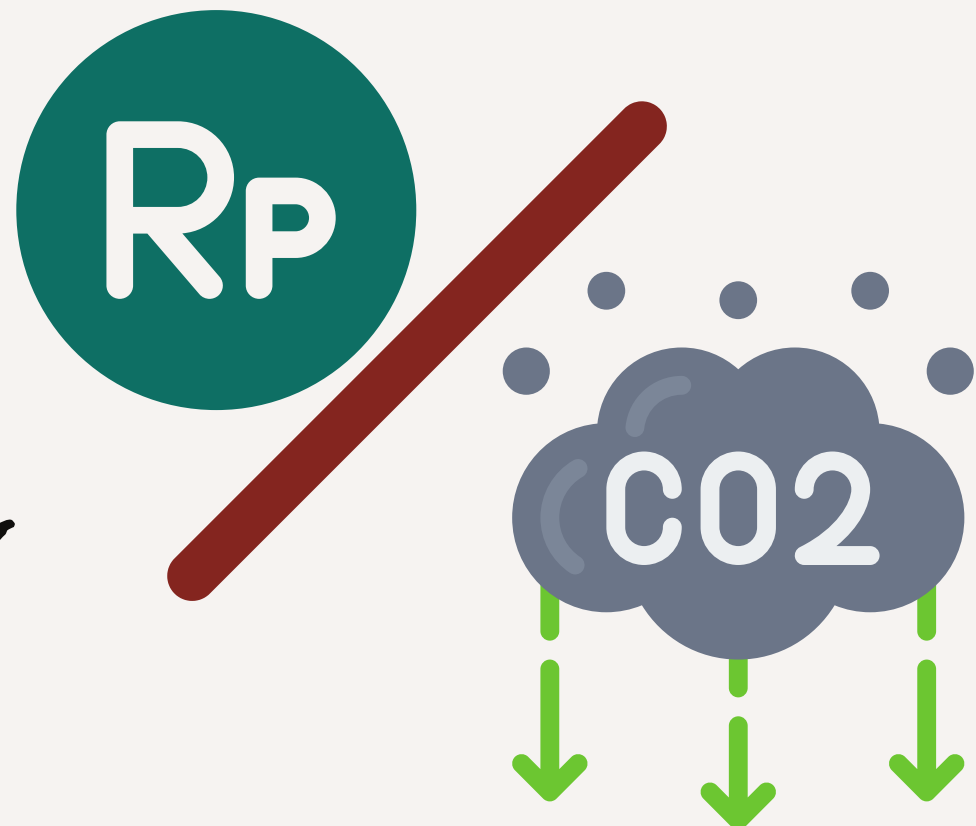


- **CBT termasuk dalam tematik APBN** dan dilakukan dalam sistem Kolaborasi Sistem Perencanaan dan Penganggaran (KRISNA)
- Hasil penandaan anggaran perubahan iklim menjadi rujukan Kemenkeu c.q. DJPPR dalam penerbitan *green sukuk*

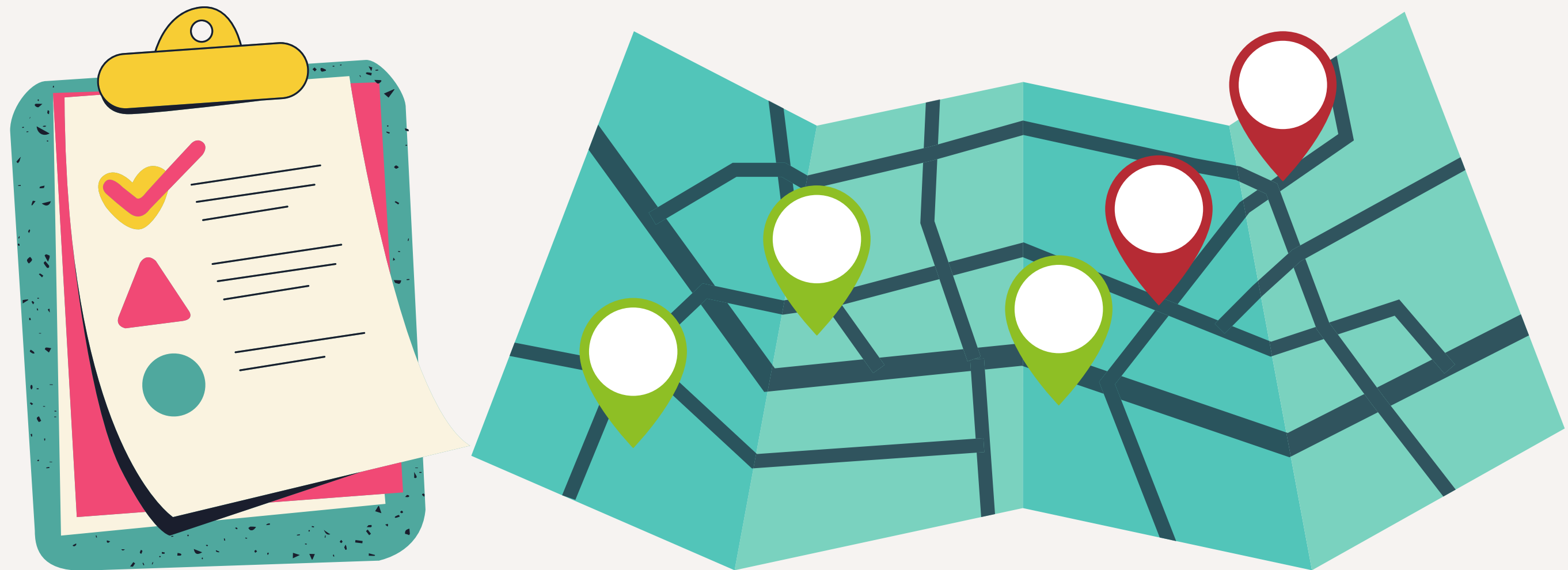




VALUE OF MONEY



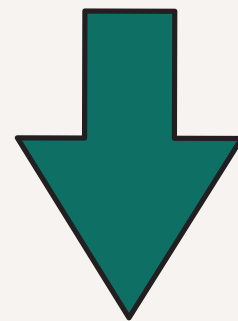
# REGIONAL CLIMATE BUDGET TAGGING



## LATAR BELAKANG PENGEMBANGAN SISTEM PENANDAAN PERUBAHAN IKLIM DI DAERAH (Provinsi, Kabupaten/Kota)

Sampai saat ini, 34 provinsi di Indonesia sudah memiliki RAD-GRK. Namun, sejauh mana pemerintah daerah sudah memahami dan mendukung aksi perubahan iklim tersebut?

Daerah mana yang perlu dilibatkan dalam pengembangan penandaan anggaran perubahan iklim di tingkat daerah?



Perlu dilakukan pemetaan dan analisis kegiatan perubahan iklim di tingkat daerah yang didanai APBD (provinsi/kabupaten/kota).

Identifikasi provinsi dan kabupaten/kota yang akan menjadi pilot project.

## MAINSTREAMING PERUBAHAN IKLIM DI TINGKAT DAERAH



PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH  
(RKA OPD dan APBD)



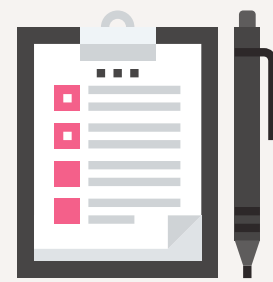
INVENTARISASI GRK DAERAH DAN  
PROPORSI ANGGARAN PERUBAHAN IKLIM DI DAERAH



PENCAPAIAN TARGET NDC, RAD-GRK, RAN-API DAN PPRKD  
(Program Pembangunan Rendah Karbon Daerah)

## TUJUAN PENANDAAN ANGGARAN PERUBAHAN IKLIM DI DAERAH

- Mengidentifikasi kegiatan apa saja yang sudah dilakukan daerah dalam mendukung aksi perubahan iklim.
- Meningkatkan pemahaman dan kapasitas daerah dalam mendukung aksi perubahan iklim.
- Mendorong pemda dalam kebijakan pendanaan perubahan iklim diluar APBD, termasuk mendukung pemda terhadap fasilitas pendanaan, internasional seperti *Green Climate Fund (GCF)*.



## SUB NATIONAL CLIMATE BUDGET TAGGING

### Konsep Informasi Kinerja Jika Tingkat Daerah Mengimplementasikan CBT

Fungsi	Input	Aktivitas	Output	Customer	Outcome	Kondisi
Belanja Pemerintah Daerah	Tujuan yang tercantum dalam RKPD	Program, kegiatan, dan output OPD terkait mitigasi tahun berjalan	Sasaran yang tercantum dalam RKPD	Satuan Kerja pada program dan kegiatan OPD	Indikasi capaian penurunan emisi GRK berdasarkan RAD-GRK/NDC	Target capaian penurunan emisi dari masing-masing OPD

Urusan	Input	Aktivitas	Output	Customer	Outcome	Kondisi
Urusan Lingkungan Hidup Sub Urusan Persampahan	Program Pengembangan Teknik Mengolah Sampah Rumah Tangga	Sosialisasi Teknik Mengolah Sampah Rumah Tangga	Jumlah Rumah Tangga yang Mengelola Sampah	Dinas Lingkungan Hidup dan Rumah Tangga	Volume Sampah yang Diangkut ke TPA Berkurang	Misi 4 Sasaran: Mewujudkan fungsi SDA LH yang serasi Arah Kebijakan: Peningkatan upaya pengendalian pencemaran Indikator: Tingkat kualitas lingkungan hidup

- Identifikasi sistem perencanaan dan penganggaran di daerah yang menjadi lokasi pilot (sistem manual atau e-planning dan e-budgeting)
- Identifikasi kontribusi anggaran belanja daerah terhadap pencapaian target RAD-GRK dan NDC.



## SUB NATIONAL CLIMATE BUDGET TAGGING

### CONTOH REKAPITULASI HASIL PENANDAAN ANGGARAN PERUBAHAN IKLIM

OPD	Kegiatan Langsung	Kegiatan Tidak Langsung	Capaian Pembangunan	Kontribusi Perubahan Iklim
<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup</li> </ul>	<p>Rp5.957.688.000,- (Sumber: APBD 2016)</p>	<p>Rp4.434.087.489,- (Sumber: APBD 2016)</p>	<p><b>Misi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan ekonomi berbasis ekonomi kerakyatan dan sektor ekonomi potensial dalam upaya penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat dengan tetap memperhatikan lingkungan hidup.</li> </ul> <p><b>Arah Kebijakan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta efektivitas pengelolaan dan konservasi sumber daya alam</li> </ul> <p>Sumber: RPJMD 2016-2020 Kab. Kutai Barat</p>	<p>Mitigasi &amp; Adaptasi</p>



BADAN KEBIJAKAN FISKAL  
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA



Partnership  
for  
Development

BUKU PEDOMAN  
**Penandaan Anggaran Daerah  
untuk Perubahan Iklim**



Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral

Badan Kebijakan Fiskal  
Kementerian Keuangan Republik Indonesia

2019

**BAB I PENDAHULUAN ( latar belakang, tujuan dan regulasi terkait)**

**BAB II KERANGKA KERJA PENELAHAAN DOKUMEN;**

**BAB III PEDOMAN PRAKTIS PENANDAAN ANGGARAN;**

**BAB IV PEDOMAN ANALISIS HASIL PENANDAAN**



@madaniberkelanjutan.id



@yayasanmadani



Madani Berkelanjutan



www.madaniberkelanjutan.id



## KELENGKAPAN DATA OPD

NO	SKPD	2014	2015	2016
1	Dinas Kesehatan	1	1	1
2	Dinas Perindustrian, Perdagangan	1	1	1
3	Dinas Kelautan dan Perikanan	1	1	1
4	Dinas Kehutanan	1	1	1
5	Badan Lingkungan Hidup (BLH)	1	1	✗
6	BAPPEDA (Badan Perencanaan Daerah)	1	1	1
7	Dinas Peternakan	1	1	1
8	Dinas pendidikan	1	1	1
9	Dinas Pertanian	1	1	1
10	Dinas Pekerjaan Umum	✗	1	1
11	Dinas perkebunan	1	1	1
12	Dinas energi dan sumber dan mineral	1	1	1
13	Dinas kebudayaan dan Pariwisata	1	1	1
14	Badan Penelitian dan Pengembangan daerah	1	1	1
15	Dinas perhubungan	1	1	1
16	Badan Ketahanan Pangan	1	1	✗
17	BPBD	1	1	1

# REGIONAL GREEN BUDGET TAGGING



BADAN KEBIJAKAN FISKAL  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**Madani**



@madaniberkelanjutan.id



@yayasanmadani



Madani Berkelanjutan



www.madaniberkelanjutan.id



## ISU UTAMA LOCAL GREEN - BUDGET TAGGING

①



②



### Identifikasi akun Belanja Langsung (Permendagri 13/2006):

- Belanja Pegawai (5.2.1) → belanja kompensasi (gaji & tunjangan) serta penghasilan lainnya;
- Belanja Barang dan Jasa (5.2.2) → pembelian brg & jasa yg nilai manfaatnya < 12 bulan;
- Belanja Modal (5.2.3) → pembelian brg & jasa yng nilai manfaatnya > 12 bulan;

**Belanja Tidak Langsung  
Belanja pegawai (gaji & tunjangan);**

1. Bunga;
2. Subsidi;
3. Hibah;
4. Bansos;
5. Belanja Bagi Hasil;
6. Bantuan Keuangan
7. Belanja Tidak Terduga



**Belanja Pegawai**

Honorarium dan upah



**Belanja Brg & Jasa**

1. Bja brg pakai habis
2. Bhn/material
3. Jasa kantor
4. Premi asnsi
5. OM KB
6. Cetak
7. Sewa
8. Perjadin
9. Pakaian dinas



**Belanja Modal**

1. Tanah
2. Peralatan
3. Mesin
4. Gedung
5. Jalan
6. Bangunan
7. Irigasi
8. Jaringan



- Berdasarkan hasil kesepakatan pertemuan pendahuluan;
- GBT dimensinya lebih luas dibandingkan Climate Change Budget Tagging;
- Daftar rujukan dari Green Planning and Budgeting (BKF, Kemenkeu) yang diterjemahkan ke dalam Cluster Pembangunan Hijau WWF yaitu:

1. Perlindungan SDA; → Regional Climate Budget Tagging
2. Pertanian;
3. Energi & Industri;
4. Transportasi & Tata Kota/Tata Daerah;
5. Kesehatan & Pendidikan;
6. Penanggulangan Bencana & Kebijakan Pendukung Lainnya





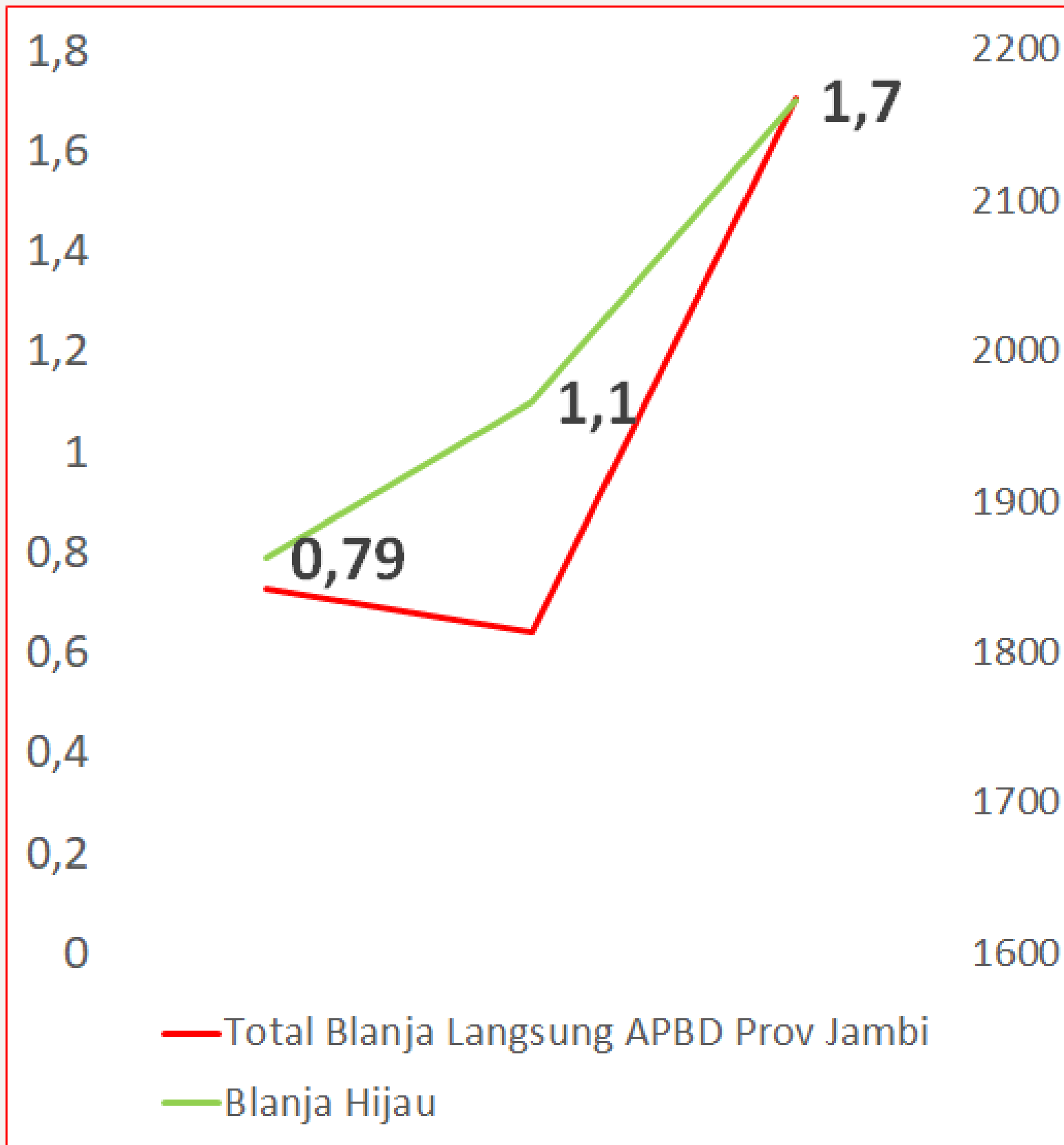
## Kesepakatan Awal GBT Prov xxxx

- Dokumen yang di analisis adalah DPA OPD APBD 2014-2016;
- Diselaraskan dgn visi dan misi Prov xxxxx. Dgn demikian akan terlihat misi mana yang terimplementasi dan teranggarkan dlm APBD serta sinkronisasi nya;

1. Misi 4 → Meningkatkan pengelolaan SDA yang optimal dan berwawasan LHD RPJMD 2010-2015;
2. Misi 2 → Meningkatkan kualitas pendidikan, kes, kehidupan beragama & berbudaya;
3. Misi 4 → Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pemb eko kerakyatan didukung IPTEK berwawasan LH;
4. Misi 5 → Meningkatkan akses dan infrastruktur umum energi berkelanjutan SDAà RPJMD 2016-2020

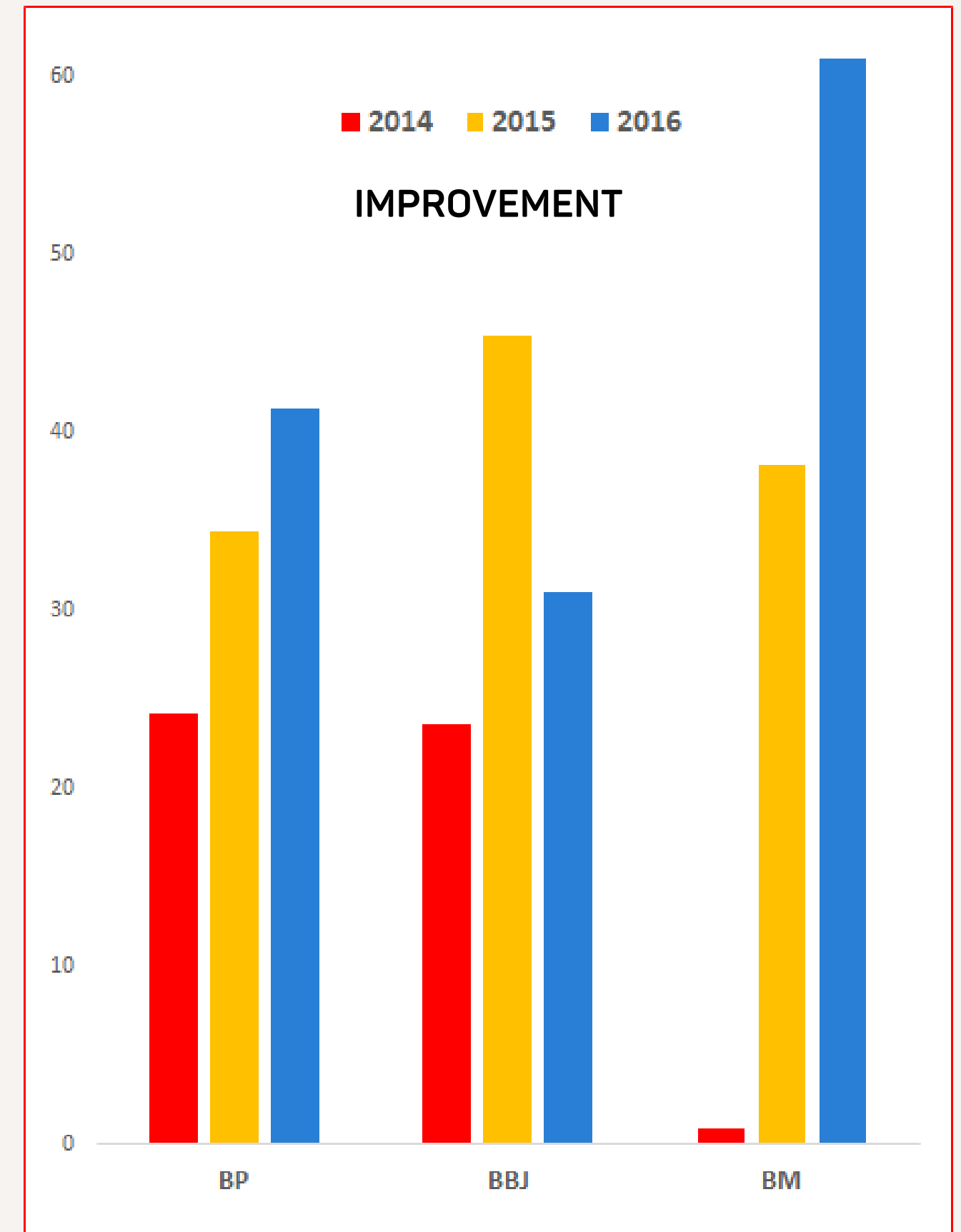
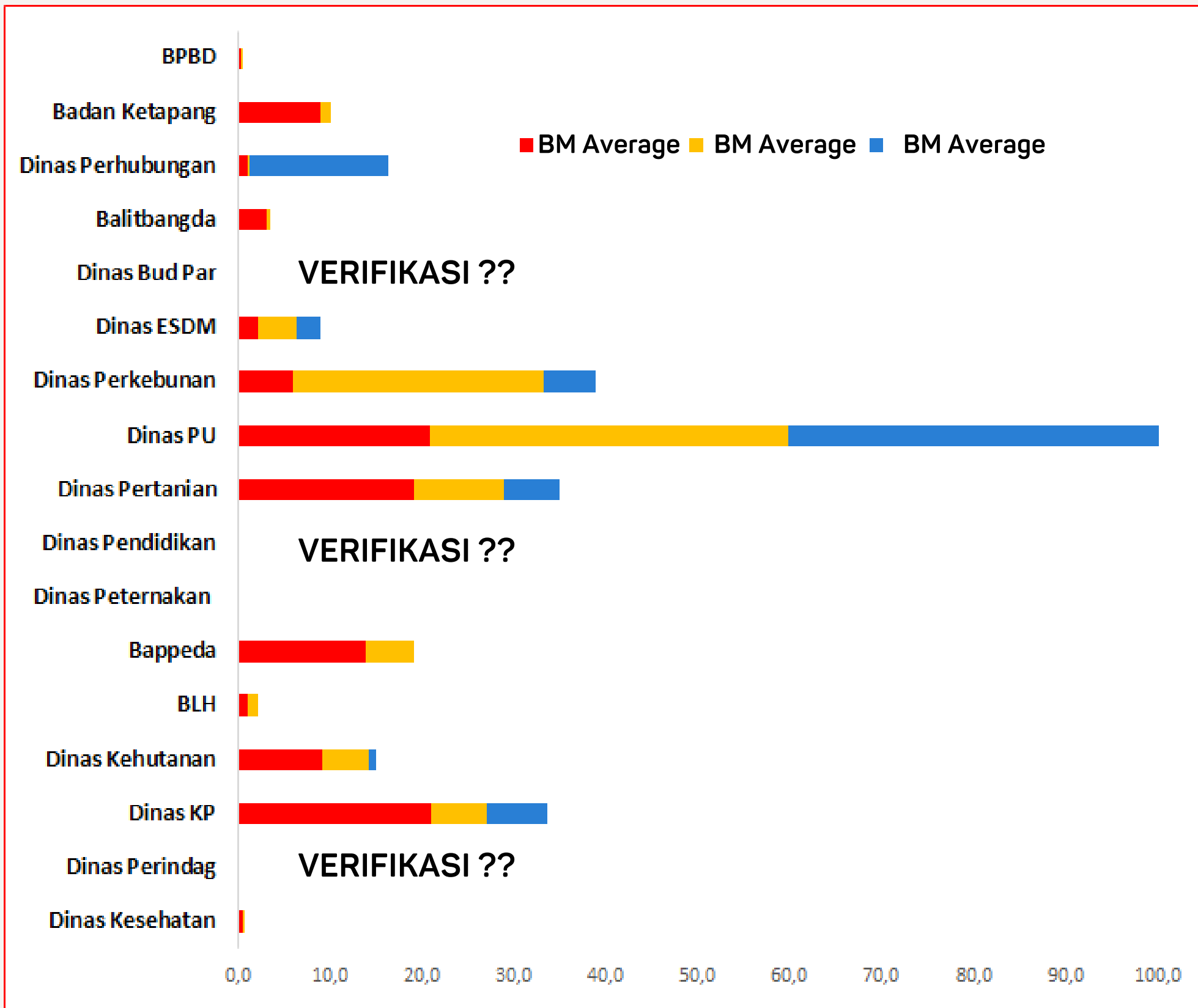
## OPD yang dianalisis terdiri dari:

1. Din Kesehatan;
2. Din Perindustri & Perdag;
3. Dinas Kelautan Perikanan;
4. Dinas Kehutanan;
5. BLH;
6. Bappeda;
7. Din Peternakan;
8. Din Pendidikan;
9. Din Pertanian;
10. Din PU;
11. Din Perkebunan;
12. Din ESDM;
13. Dinas Budpar;
14. Balitbangda;
15. Din Perhub;
16. Badan Ketapang;
17. BPBD



**ANGGARAN HIJAU PERSENTASENYA MASIH RELATIF KECIL NAMUN TREN TERUS MENINGKAT**

# % JENIS BELANJA HIJAU OPD





## TAGGING PERMENDAGRI 90/2019 (Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah)

	PROVINSI						
	KODE						URUSAN/ SUB-URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ LAYANAN
5 <i>BIDANG/ URUSAN</i>	11						URUSAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
6 <i>Sub Urusan</i>	11 01						SUB URUSAN - Perencanaan Lingkungan Hidup
7 <i>Unsur Dinas (Nama Bidang)</i>	11 01 1						PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN TATA LINGKUNGAN
8 <i>Kewenangan</i>	11 01 1 01						Kegiatan RPPLH Provinsi
9 <i>Layanan Utama</i>	11 01 1 01 01						<i>Penyediaan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tingkat daerah Provinsi dan/atau lintas daerah kabupaten/kota</i>
10 <i>Komponen Input</i>	11 01 1 01 01 01						penyusunan rencana tentang pemanfaatan dan/atau pencadangan sumberdaya alam
11	11 01 1 01 01 02						penyusunan rencana tentang pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidupdaya alam
12	11 01 1 01 01 03						penyusunan rencana tentang pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber dayaalam
13	11 01 1 01 01 04						penyusunan rencana tentang adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim
14	11 01 1 01 01 05						... dst ...

**NOMENKLATUR PADA PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN APBD PROVINSI, KABUPATEN/KOTA**

## REGIONAL TAGGING ADAPTASI KE DEPAN

1. Tetapkan pedoman dan definisi adaptasi perubahan iklim ;
2. Tetentukan kata kunci menjelaskan isu adaptasi perubahan iklim;
3. Sesuaikan dengan Permendagri Nomor 90/2019;
4. Tetapkan OPD yang terkait ( lintas sektoral) dan di level apa ;
5. Bappeda menjadi PIC utama untuk membentuk Pokja tagging;
6. Integrasi proses Tagging ke dalam sistem penganggaran daerah dan menjadi dasar penyusunan RPJMD;





**BADAN KEBIJAKAN FISKAL**  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA



**Madani**



# THANK YOU!

*SAMPAI BERTEMU HARI KE- 2*